



KABUPATEN BADUNG

**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2019**

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2018**



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 43/051/HK/2018
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Badung Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019, maka Dinas Sosial Kabupaten Badung wajib menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Badung Tahun 2019, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2019;
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 - 135 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Badung Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Badung Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan sistematika Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Badung Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Badung Tahun lalu

Bab III. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Badung

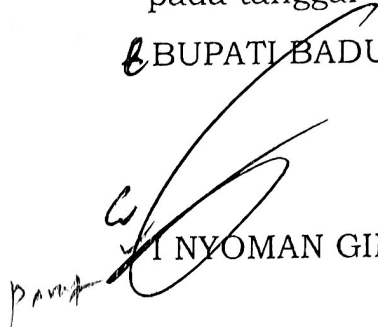
Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Badung

Bab V. Penutup

- KETIGA : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 4 Juli 2018

BUPATI BADUNG,


I NYOMAN GIRI PRASTA

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
BADUNG NOMOR 43/051/HK/2018
TENTANG PENETAPAN RENCANA
KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN
BADUNG TAHUN 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS SOSIAL
UNIT XII LANTAI 1 DAN 2
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI – BADUNG BALI TELP (0361) 9009333 FAX (0361)
9009316

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 9155/03/ HK / 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Badung Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Badung Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 12 tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Badung Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu :
- menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Dinas Sosial Kabupaten Badung dan perubahannya;
 - mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Sosial; dan
 - bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 29 Desember 2017

a.n. BUPATI BADUNG
KEPALA DINAS SOSIAL,


DRH. I KETUT SUDARSANA, M.MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640705 199203 1 011

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Bupati Badung sebagai Laporan.
- Ketua DPRD Kabupaten Badung.
- Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
- Yang Bersangkutan.

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NO : 1955/03/ HK / 2017
TGL : 29 DESEMBER 2017
ANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH PADA
DINAS SOSIAL KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

UNDANG KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2019

Ketua	: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung.
Wakil Ketua	: Sekretaris pada Dinas Sosial Kabupaten Badung.
Sekretaris	: Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Sosial Kabupaten Badung.
Bendahara	: Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Kabupaten Badung.
Anggota	: 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Badung 2. Para Kepala Sub Bagian/ Seksi/ UPTD pada Dinas Sosial Kabupaten Badung
Staf Administrasi	: Staf pada Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Sosial Kabupaten Badung.

a.n. BUPATI BADUNG
KEPALA DINAS SOSIAL,



DRH. KETUT SUDARSANA, M.MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640705 199203 1 011

DAFTAR ISI

Halaman

**KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 43/051/HK/2018 TENTANG PENETAPAN
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 43/051/HK/2018 TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019**

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Sasaran Renstra Dinas Sosial.....	5
2.2 Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.....	32
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL.....	33
3.1 Tujuan Dinas Sosial	33
3.2 Sasaran Dinas Sosial.....	33
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL	35
Program dan Kegiatan.....	35
BAB V. PENUTUP.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2018 Kabupaten Badung.....	6
Tabel 2.2	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2017	14
Tabel 2.3	Meningkatnya rehabilitas sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	16
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Sasaran : 2 Meningkatnya penanganan tanggap darurat bagi korban bencana sesuai standar.....	24
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Sasaran : 3 Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).....	25
Tabel 2.6	Pemanfaatan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Tahun 2016 dan Tahun 2017.....	29
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Sasaran : 4 Meningkatkan implementasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah.....	31
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memantapkan implementasi formulasi mekanisme perencanaan penganggaran daerah secara partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana masing-masing perangkat daerah berkewajiban menyusun dokumen rencana kerja (RENJA) perangkat daerah setiap tahun yang berpedoman pada RENSTRA dan mengacu pada RKPD perangkat daerah. Setiap Kepala Perangkat Daerah menyiapkan rencana kerja (Renja) perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Dinas Sosial Kabupaten Badung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial. Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Sosial Kabupaten Badung menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- d. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah memiliki peran yang semakin besar dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan, berorientasi pada pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat. Untuk menyelaraskan pembangunan, baik antar daerah dan pusat, maupun antar sektor pembangunan, maka disusun sebuah dokumen perencanaan yang holistik, menyeluruh, terpadu dan berjenjang, sehingga pola pembangunan menjadi tidak parsial dan sektoral.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial ini merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas

Sosial Kabupaten Badung, memuat program dan kegiatan prioritas yang direncanakan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1.2 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- m. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
- n. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- o. Peraturan Bupati Badung Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019;

1.3 Maksud dan Tujuan

- a. Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Badung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Sosial Tahun Anggaran 2019.
- b. Tujuan penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Badung adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Badung dalam perencanaan pembangunan bidang sosial.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Dinas Sosial Kabupaten Badung ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL DAN TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL

- 3.1 Tujuan Renja Dinas Sosial
- 3.2 Sasaran Renja Dinas Sosial

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian

Sasaran Renstra Dinas Sosial

Dalam bab ini, pelaksanaan rencana kerja yang dievaluasi adalah pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun 2018 dibidang urusan sosial. Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu terhadap pencapaian sasaran Rencana strategis maka beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan tahun lalu ada yang telah mencapai target diantaranya kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Sehat, pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan bantuan kepada KUBE Fakir Miskin. Dengan adanya kegiatan ini jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) telah dapat menurun dengan Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai sasarannya.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2018
Kabupaten Badung

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (n-1) Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan						
															Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2018)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2018)				
										Target Renja PD Tahun n-2			Realisasi Renja PD Tahun n-2		Tingkat Realisasi %	Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2018)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2018)			
1				2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)		
1			01	URUSAN WAJIB																	
				URUSAN SOSIAL																	
				DINAS SOSIAL																	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	%														
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100	12	bulan	36	bulan	60,00	
				06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	129	unit	36	unit	21	unit	14	unit	66,67	23	unit	73	unit	56,59	
				07	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah dan jenis administrasi keuangan yang tersedia	60	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100	12	bulan	36	bulan	60,00	
				08	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100	12	bulan	36	bulan	60,00	
				10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	5	paket	1	paket	1	paket	1	paket	100	1	paket	3	paket	60,00	
				11	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5	paket	1	paket	1	paket	1	paket	100	1	paket	3	paket	60,00	
				12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	paket	2	paket	2	paket	2	paket	100	2	paket	6	paket	60,00	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (n-1) Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan								
										Target Renja PD Tahun n-2		Realisasi Renja PD Tahun n-2			Tingkat Realisasi %	Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2018)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2018)					
										2016		2017		2017		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)					
1				2		3		4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2520	exp	528	expl	506	expl	506	expl	100	506	expl	1540	expl	61,11				
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	60	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100	12	bulan	36	bulan	60,00				
			18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5	paket	1	paket	1	paket	1	paket	100	1	paket	3	paket	60,00				
			19	Penyediaan Bahan Dekorasi	Jumlah bahan dekorasi yang disediakan	5	paket	1	paket	1	paket	1	paket	100	1	paket	3	paket	60,00				
			20	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakan untuk kendaraan dinas	149.388	liter	33.534	liter	23.739	liter	22.076	liter	92,9946502	30.336	liter	85946	liter	57,53				
			21	Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan	Jumlah bahan upacara keagamaan yang tersedia	60	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100	12	bulan	36	bulan	60,00				
			22	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Waktu penyediaan jasa pegawai tidak tetap	5	orang	2	orang	1	orang	0	orang	0	0		2	orang	40,00				
			23	Kegiatan Lomba Olah Raga/Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura	Jumlah kegiatan / paket olah raga kesenian hari-hari bersejarah yang diikuti	5	paket	0	paket	1	paket	1	paket	100	1	paket	2	paket	40,00				
			26	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Khayangan Jagat	Jumlah bahan upacara keagamaan yang tersedia	5	paket	1	paket	1	paket	1	paket	100	1	paket	3	paket	60,00				
			27	Penyediaan jasa publikasi pengumuman lelang melalui media cetak	Terpublikasinya informasi lelang pengadaan barang dan jasa	5	paket	0	paket	1	paket	0	paket	0	0		0	paket	0,00				
			02	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana																		
			05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	13	unit	1	kendaraan	10	kendaraan	6	kendaraan	60	3	kendaraan	10	unit	76,92				
			09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	7	paket	2	paket	2	paket	2	paket	100	2	paket	6	paket	85,71				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (n-1) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan							
								Target Renja PD Tahun n-2 2017	Realisasi Renja PD Tahun n-2 2017	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2018) (%)						
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)						
			11	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5	paket	1	paket	1	paket	100	1	paket	3	paket	60,00		
			22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	5	paket	1	paket	1	paket	100	1	paket	3	paket	60,00		
			24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara rutin/berkala	105	unit	37	unit	21	unit	21	unit	100	24	unit/paket	82	unit	78,10
			26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	60	bulan	12	bulan/50 unit	12	bulan/ 35 unit AC	9	bulan	75	12	bulan	33	unit	55,00
						5	paket gorden			1	paket gorden	1	paket gorden	100		1	unit	20,00	
			28	Pemeliharaan Peralatan kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	5	paket	1	paket	1	paket	1	paket	100	1	paket	3	paket	60,00
			06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan														
			01	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	60	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100	12	bulan/33 orang	36	bulan	60,00
			05	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	125	buku	25	buku	25	buku	25	buku	100	25	buku	75	buku	60,00
			08	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebaran Informasi	Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas penyebaran informasi														
			03	Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS di Kabupaten Badung	Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas data PMKS dan PSKS	400	buku	-	buku	80	buku	80	buku	100	80	buku	160	buku	40,00

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu(n-2)					Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (n-1) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan						
						Target Renja PD Tahun n-2		Realisasi Renja PD Tahun n-2		Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2018)					
						2016	2017	2017										
1		2	3	4	5	6		7		8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)		11 = (10/4)				
		09	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Kesesuaian Renja SKPD dengan RKPD														
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra,Renja ,RKA)	Jumlah dan jenis kegiatan direncanakan dandianggarkan	15	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100	3	dokumen	9	dokumen	60,00
		15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Presentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima bantuan peningkatan														
		01	Bimbingan dan Pendampingan Bagi KUBE Fakir Miskin	Jumlah KUBE fakir miskin yang mandapatkan bantuan	25	KUBE	3	KUBE	8	KUBE	8	KUBE	100	13	KUBE	24	KUBE	96,00
		02	Kepedulian terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat	Jumlah RTS yang mendapatkan program perlindungan sosial	125	RTS			25	RTS	25	RTS	100	25	RTS	50	RTS	40,00
		03	Verifikasi danMonitoring Peningkatan Kualitas Rumah Sehat	Jumlah rumah tangga sasaran yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas rumah sehat	3100	RTS	600	RTS	625	RTS	623	RTS	99,68	2475	RTS	3698	RTS	119,29
		16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan penyandang disabilitas diluar panti dan/atau lembaga yang mendapatakan rehabilitasi sosial dasar														
		02	Pembinaan Penampungan Sementara dan Pemulangan PSK Gepeng ke Daerah Asal	Jumlah PSK gepeng yang dipulangkan ke daerah asal	2000	orang	400	orang	400	orang	25	orang	6,25	450	orang	875	orang	43,75
		03	Pembinaan kepada Penyandang Disabilitas dan Warga Lanjut Usia Miskin	Cakupan penyandang disabilitas yang seharusnya memperoleh bantuan alat bantu kecacatan	600	orang	0	orang	600	orang	600	orang	100	600	orang	1200	orang	200,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu(n-2)				Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (n-1) Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan							
										Target Renja PD Tahun n-2		Realisasi Renja PD Tahun n-2				Tingkat Realisasi %	Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2018)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2018)				
										2017		2017		10 = (5+7+9)			11 = (10/4)						
1				2		3		4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
			04	Peningkatan Kesejahteraan dan Peran Veteran Pejuang Kemerdekaan RI di Kabupaten Badung	Jumlah Veteran yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	900	orang	60	orang	300	orang	300	orang	100	150	orang	510	orang	56,67				
			07	Pengendalian Pemanfaatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kepada Keluarga Rumah Tangga Miskin di Kab.Badung	Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang memperoleh Bantuan UEP	3100	orang	600	orang	625	orang	625	orang	100	2475	RTS	3700	orang	119,35				
			12	Penanganan Orang Terlantar di Kabupaten Badung	Jumlah Orang terlantar yang tertar	150	orang	10	orang	30	orang	30	orang	100		40	orang	26,67					
			13	Pendampingan dan penjangkauan kepada mantan pencandu Napza Pasca rehabilitasi	Jumlah Mantan pecandu napza yang mendapatkan pendampingan	348	orang			148	orang	148	orang	100	50	orang	198	orang	56,90				
			14	Pelatihan Ketrampilan menjahit kepada penyandang disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelatihan ketrampilan Menjahit	20	orang			20	orang	20	orang	100	0	orang	20	orang	100,00				
			14	Pelatihan Ketrampilan Pijat kepada penyandang disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelatihan ketrampilan Pijat	80	orang			0	orang	0	orang	0	80	orang	0	orang	0,00				
			15	Pembinaan dan pelayanan sosial kepada Karang Lansia di Kabupaten Badung	Jumlah Karang lansia yang mendapatkan pembinaan	75	karang lansia			15	karang lansia	15	karang lansia	100	15	karang lansia	30	karang lansia	40,00				
			17	Penyediaan Layanan Dapur Umum bagi korban pasca Bencana di Kabupaten Badung	Jumlah korban pasca bencana yang mendapatkan pelayanan	250	orang			50	orang	50	orang	100	50	orang	100	orang	40,00				
			18	Penangann anak yang rentan berhadapan dengan hukum	Terciptanya Kesejahteraan sosial anak yang berhadapan dengan hukum	120	orang			20	orang	20	orang	100		20	orang	16,67					
			20	Verifikasi Bantuan sosial bagi Penunggu Pasien di Kabupaten Badung	Jumlah penunggu pasien yang dapat diberikan bantuan sosial	30000	orang			6000	orang	680	orang	11,33	6000	orang	6680	orang	22,27				
			19	Pengadaan alat bantu kecacatan di Kab. Badung	Jumlah penyandang disabilita yang mendapatkan bantuan alat bantu kecacatan	122	orang	0	orang	94	orang	94	orang	100	0	orang	94	orang	77,05				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (n-1) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan					
									Target Renja PD Tahun n-2		Realisasi Renja PD Tahun n-2		Tingkat Realisasi %	Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2018)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2018)		
1				2	3	4		5		6		7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
21	22	Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Cacat Permanen dan Warga Lanjut Usia di Kabupaten Badung	Jumlah warga lanjut usia di Kab. Badung yang memperoleh perlindungan sosial	4	paket/204 orang	0		0	0	0	0	1	paket	1	paket	25,00		
	23	Monev Kegiatan PKH, ASLUT,ASPDB di Kab. Badung	cakupan kegiatan PKH,ASLUT,ASPDB yang dimonev	24	kecamatan	0		0	0	0	0	6	kec	6	kec	25,00		
	24	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Rumah Singgah di Kab. Badung	Pembangunan Rumah Singgah Yang Feasible	0		0		0	0	0	0	1	paket	1	paket	0		
	25	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Panti Asuhan di Kab. Badung	Pembangunan Panti Asuhan Yang Feasible	0		0		0	0	0	0	1	paket	1	paket	0,00		
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Presentase Kelompok usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan															
	02	Pendampingan kepada KUBE Fakir Miskin Penerima Program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS)	Terbinanya KUBE Fakir miskin penerima BLPS	10	KUBE	17	KUBE	10	KUBE	10	100	0	KUBE	27	KUBE	270,00		
	05	Pelestarian Nilai Perjuangan Masyarakat Badung	Terwujudnya pelestarian nilai perjuangan masyarakat Badung	5	paket	1	paket	1	paket	1	100	1	paket	3	paket	60,00		
	06	Napak Tilas Jejak Pahlawan I Gusti Ngurah Rai	Terlaksananya Napak Tilas Jejak Pahlawan I Gusti Ngurah Rai	3300	orang/300 regu	660	orang/60 regu	660	orang/60 regu	660	100	660	orang/60 regu	1980	orang/120regu	60,00		
	08	Peningkatan Peran K3S Kabupaten Badung	Meningkatnya peran aktif K3S Kabupaten Badung	5	paket/985 orang	1	paket/75 orang	1	paket	1	100	1	paket	3	paket	60,00		
	09	Peringatan Hari Lanjut Usia (HLUN) di Kabupaten Badung	Terlaksananya Peringatan Hari Lajnut Usia Nasional di Kabupaten Badung	1000	lansia	200	lansia	200	lansia	200	100	200	lansia	600	orang	60,00		
	11	Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) di Kabupaetn Badung	Terlaksananya Peringatan Hari Disabilitas Internasional di kabupaten Badung	1000	orang	150	orang	200	orang	200	100	200	orang	550	orang	55,00		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (n-1) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan					
										Target Renja PD Tahun n-2		Realisasi Renja PD Tahun n-2		Tingkat Realisasi %	Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2018)			
										2017		2017							
1				2	3	4		5		6		7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)			
			12	Pembinaan dan Lomba Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Karang Taruna (KT) breprestasi Tingkat Provinsi	Jumlah Pekerja sosial masyarakat dan karang taruna berprestasi	30	PSM/30 karang taruna	6	PSM/6 karang taruna	6	PSM/ karang taruna	6	PSM/ karang taruna	100	6	PSM/ karang taruna	18	PSM/ karang taruna	60,00
			13	Peringatan Hari Besar Nasional	Terlaksananya peringatan hari besar nasional	20	hari besar	4	hari besar	4	hari besar	4	hari besar	100	4	hari besar	12	hari besar	60,00
			14	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Sosialisasi Penyelenggaraan Undian Berhadiah/UGB dan Pengumpulan Uang/Barang/PUB)		782	Orang	0		62	orang	62	orang	100	180	orang	242	orang	30,95
			15	Peningkatan Peran Aktif PWRI dan Komda Lansia Kabupaten Badung		8	Organisasi	0		2	organisasi	2	organisasi	100	2	organisasi	4	organisasi	50,00
			16	Pengawasan Monitorin dan Evaluasi LKS/Yayasan/Panti di Kabupaten Badung		80	LKS/Yayasan/Panti	0		0		0		0	20	LKS/Yayasan/Panti	20	LKS/Yayasan/Panti	25,00
			17	Peningkatan Peran Aktif Pogram Keluarga Harapan (PKH di Kabupaten Badung)		4	Organisasi	0		0		0		0	1	organisasi	1	organisasi	25,00
			18	Peningkatan Peran Aktif Taruna Siaga Bencana (TAGANA) di Kabupaten Badung		4	Organisasi	0		0		0		0	1	organisasi	1	organisasi	25,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Badung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016 – 2021 maupun dalam RKPD Tahun 2017. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai. Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Badung ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Badung khususnya urusan sosial yang terdiri dari 2 tujuan dan 4 sasaran dengan 10 indikator kinerja sasaran (*outcome*) dengan rincian sebagai berikut :

Analisis atas capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2017, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Badung berupa Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Badung, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Dinas Sosial tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas Dinas Sosial Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2017 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 (dua) sasaran dan 10 (sepuluh) indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.2
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2017

No.	Sasaran strategis	Indikator	Satuan (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Cakupan Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Sosial Dasar	orang	694	694	100
		2. Cakupan Anak yang memperoleh bantuan rehabilitasi sosial dasar	orang	20	20	100
		3. Cakupan Tuna Sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	orang	430	55	12,79
		4. Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan peningkatan kesejahteraan sosial	orang	798	796	99,75
2	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bagi korban bencana sesuai standar	1. Cakupan korban bencana yang berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan sandang,pangan, tempat tinggal sementara, dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap	orang	50	50	100

3	Meningkatnya akses kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	darurat dan pasca bencana				
		1. Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh pemberdayaan Sosial	orang	725	725	100
4	Meningkatkan implementasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah	2. Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	orang	6000	680	11,33
		1. Persentase kehadiran pegawai	%	100	100	100 %
		2. Predikat AKIP		B	-	-
		3. Persentase realisasi belanja langsung dan tidak langsung	%	100	100	100

Analisis atas capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2017, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Badung berupa Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Badung, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Dinas Sosial tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas Dinas Sosial Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2017 dengan membandingkan antara target dan realisasi serta capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1:

Meningkatnya rehabilitas sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Sasaran 1 yaitu Meningkatkan rehabilitas sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terdiri dari 4 Indikator Kinerja. Untuk melihat ketercapaian indikator kinerja ini, dapat dijelaskan pada pengukuran dan analisis sebagai mana pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Sasaran : 1

Meningkatnya rehabilitas sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

No	Indikator Sasaran	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017
		Target	realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Sosial Dasar	142 orang	142 orang	100 %	694	694	100 %
2.	Cakupan Anak yang memperoleh bantuan rehabilitasi sosial dasar	-	-	-	20 orang	20 orang	100 %
3.	Cakupan Tuna Sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	430 orang	130 orang	30,23 %	430 orang	55 orang	12,79 %
4.	Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan peningkatan kesejahteraan sosial	600 orang	600 orang	100 %	798	796	99,75 %

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga atau kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani maupun rohani secara memadai dan wajar. Dari tabel 2.2 untuk tiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator 1 :
Cakupan Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Sosial Dasar

Berdasarkan tabel 2.2, realisasi cakupan penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan rehabilitasi sosial dasar tahun 2017 terealisasi sebesar 694 orang, sesuai dengan target kinerja sebesar 694 orang sehingga capaian kinerja sebesar 100 %.

Tecapainya target kinerja cakupan penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan rehabilitasi sosial dasar disebabkan karena komitmen pimpinan dan seluruh komponen perangkat daerah dalam memeberikan pelayanan, bantuan dan rehabilitasi sosial dasar kepada penyandang



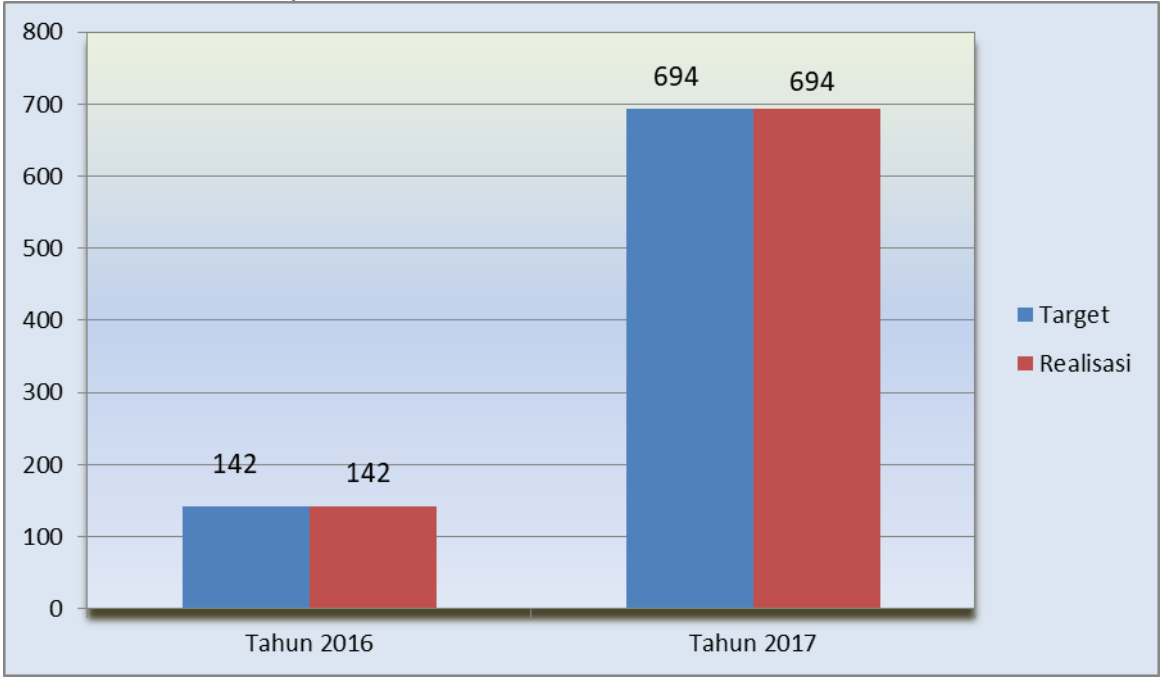
disabilitas di Kabupaten Badung. Komitmen tersebut dituangkan dalam program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial yaitu dalam kegiatan Pembinaan kepada penyandang disabilitas dan warga lanjut usia miskin dan kegiatan Pengadaan alat bantu kecacatan di

Kabupaten Badung. Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan rehabilitasi dan pelayanan sosial kepada 94 orang penyandang disabilitas berupa layanan pemeriksaan kesehatan dan pemberian alat-alat bantu kecacatan bagi 94 orang yang berhak mendapatkannya sesuai dengan jenis kecacatan yang terdiri atas :

- 1. Kursi Roda : 50 buah
- 2. Alat Bantu Dengar : 25 buah
- 3. Kaki Palsu : 2 buah
- 4. Tongkat : 17 buah

Dan juga pemberian paket sembako pada saat Pembinaan berupa 600 paket sembako di 24 desa.

Grafik 2.1
Perkembangan Capaian Kinerja Cakupan Penyandang Disabilitas yang memperoleh Bantuan Rehabilitasi Sosial Dasar



Capaian kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2017 terjadi peningkatan disebabkan adanya komitmen untuk mempercepat pencapaian sasaran melalui penambahan alokasi anggaran dan program/kegiatan yang berorientasi meningkatkan cakupan penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan rehabilitasi sosial dasar, serta sebagai bentuk komitmen dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya mewujudkan kesejahteraan sosial.

Program yang mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan rehabilitasi sosial dasar adalah program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, jumlah kegiatan sebanyak 2 (dua) yaitu kegiatan Pembinaan kepada penyandang disabilitas dan warga lanjut usia miskin dan kegiatan Pengadaan alat bantu kecacatan di Kabupaten Badung dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 528.261.800 dan terealisasi Rp. 497.741.700 (94,22 %)

Indikator 2 :
Cakupan Anak yang memperoleh bantuan rehabilitasi sosial dasar

Berdasarkan tabel 2.2, realisasi cakupan anak yang memperoleh bantuan rehabilitasi sosial dasar tahun 2017 terealisasi sebesar 20 orang, sesuai dengan target kinerja sebesar 20 orang sehingga capaian kinerja sebesar 100 %. Tercapainya target kinerja cakupan anak yang memperoleh bantuan rehabilitasi sosial dasar disebabkan karena komitmen pimpinan dan seluruh komponen perangkat daerah dalam memeberikan pelayanan, bantuan dan rehabilitasi sosial dasar kepada anak yang rentan berhadapan dengan hukum di Kabupaten Badung. Komitmen tersebut dituangkan dalam

program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial yaitu dalam kegiatan Penanganan Anak yang Rentan Berhadapan dengan Hukum.

Untuk tahun 2016 Dinas Sosial belum melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Cakupan Anak yang memperoleh bantuan rehabilitasi sosial dasar. Baru tahun 2017 yang merupakan awal pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016-2021, Dinas Sosial melalui program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan sebagai pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tahun 2017 dilaksanakan kegiatan Penanganan Anak yang Rentan Berhadapan dengan Hukum dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.250.500 dan realisasi 7.735.300 (93,76 %). Pelaksanaan kegiatan ini sebagai amanat UU SPPA Langkah strategis Diterbitkannya SKB 6 K/L Tahun 2009 tentang Penanganan ABH Diterbitkannya Permen PP dan PA No. 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan ABH Disahkannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memuat prinsip Diversi dan Keadilan Restoratif dalam penanganan ABH. Peran KPP&PA dalam Ps. 94 UU SPPA untuk melakukan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan SPPA Capaian.

Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan Pelayanan, penanganan, dan pendampingan serta rehabilitasi Sosial Anak yang berhadapan dengan hukum, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial anak sebagai generasi penerus bangsa, dengan menyasar sekolah



SMK/SMA. Ditahun 2017 yang menjadi sasaran dari kegiatan ini adalah SMK WIRA HARAPAN DALUNG dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang.

Indikator 3

Cakupan Tuna Sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar

Berdasarkan tabel 2.2, realisasi Cakupan Tuna Sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tahun 2017 terealisasi sebesar 55 orang, dengan target kinerja sebesar 430 orang sehingga capaian kinerja sebesar 12,79 %.

Tecapainya target kinerja cakupan Tuna Sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar disebabkan karena komitmen pimpinan dan seluruh komponen perangkat daerah dalam upaya melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Gepeng dan Wanita Tuna Susila serta orang terlantar sehingga masalah sosial ini dapat diantisipasi dan dapat memperkecil dampak terhadap Kabupaten Badung sebagai daerah tujuan Wisata. Komitmen tersebut dituangkan dalam program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial yaitu dalam kegiatan Pembinaan, Penampungan Sementara dan



Pemulangan
PSK Gepeng ke
Daerah Asal
dengan pagu
anggaran
sebesar Rp.
152.108.400
dan realisasi
sebesar Rp.
9.840.000 (6,47
) dan Kegiatan
Penanganan

Orang Terlantar di Kabupaten Badung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 26.583.700 dan realisasi sebesar Rp. 9.820.700 (36,94 %).

Capaian kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2017 terjadi peningkatan disebabkan adanya komitmen untuk mencegah timbulnya permasalahan sosial dan mencegah timbulnya pengaruh negatif di masyarakat. Pencapaian indikator ini bersifat insidentil serta berbanding terbalik dengan pencapaian indikator kinerja sebagaimana biasanya. Karena semakin sedikit pencapaian dari target yang ditetapkan berarti kinerja semakin baik karena mampu menangani masalah sosial dalam hal ini berkurangnya PSK, gepeng dan orang terlantar yang ada di masyarakat khususnya di Kabupaten Badung. Jika dibandingkan tahun 2016 dan tahun 2017 dengan target yang sama yaitu 430 orang, PSK, Gepeng, dan Orang Terlantar yang tertangani di tahun 2016 sebanyak 130 orang dan di tahun 2017 sebanyak 55 orang.

Indikator 4
Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan peningkatan kesejahteraan sosial

Berdasarkan tabel 2.2, realisasi Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan peningkatan kesejahteraan sosial tahun 2017 terealisasi sebesar 796 orang, dengan target kinerja sebesar 798 orang sehingga capaian kinerja sebesar 99,75%.

Capaian target kinerja cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan peningkatan kesejahteraan sosial

99,75 % disebabkan karena ada dua Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang seharusnya menerima bantuan peningkatan rumah sehat tidak terealisasi. Namun pencapaian target yang hampir 100 % tersebut tidak terlepas dari komitmen pimpinan dan seluruh komponen perangkat daerah dalam penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Badung.



Penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Capaian Kinerja Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan peningkatan kesejahteraan sosial didukung dengan beberapa program kegiatan yaitu kegiatan Verifikasi dan Monitoring Peningkatan Kualitas Rumah Sehat dengan target 625 orang/RTS, kegiatan Kepedulian Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat dengan target 25 orang/RTS, dan Kegiatan Pendampingan dan Konseling kepada Mantan Pecandu Napza Pasca Rehabilitasi dengan target 148 orang.

- Kegiatan Verifikasi dan Monitoring Peningkatan Kualitas Rumah Sehat dengan target ditahun 2016 sebanyak 600 RTS realisasi 600 RTS dengan capaian kinerja 100 %. Sedangkan ditahun 2017 target sebanyak 625 RTS realisasi 623 RTS dengan capaian kinerja 99,75 %. Capaian kinerja di tahun 2017 tidak 100 % dikarenakan ada dua RTS yang tidak menerima bantuan dengan alasan sebagai berikut: An I Gusti Ngurah Putu Winaya Alamat Br. Aseman, Desa Abiansemal,

Kecamatan Abiansemal karena rumah yang dimohonkan bantuan PKRS ditempati oleh dua kepala keluarga dimana salah satu keluarga tidak memberikan rumah yang mereka tempati diperbaiki, An. I Made Mastra alamat Br. Gelagah Puwun, desa Kekeran, Kecamatan Mengwi mengembalikan dengan alasan dalam perjalanan waktu sebelum bantuan PKRS cair, rumah yang dimohonkan bantuan sudah diperbaiki (sudah layak huni). Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima program ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 1205/02/HK/2016 tentang Pemberian Bantuan Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Sehat Bagi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Badung Tahun 2017.

Kegiatan Verifikasi dan Monitoring Peningkatan Kualitas Rumah Sehat kalau dilihat dari target ditahun 2017 target yang ingin dicapai lebih banyak dari tahun 2016 yaitu 625 RTS, sedangkan tahun 2016 target yang ingin dicapai 600 RTS. Untuk pendanaan Kegiatan Verifikasi dan Monitoring Peningkatan Kualitas Rumah Sehat ditahun 2016 pagu anggaran sebesar Rp. 29.882.700, realisasi Rp. 19.461.700 (65,13 %), tahun 2017 pagu anggaran sebesar Rp. 392.006.050, realisasi Rp. 381.890.300 (97,42 %). Anggaran yang ada pada Dinas Sosial merupakan anggaran pendukung/operasional pelaksanaan bantuan peningkatan rumah sehat yang mana anggarannya ada pada DPA PPKD sebesar Rp. 18.750.000.000 @ Rp. 30.000.000 untuk masing-masing RTS. Program kegiatan ini diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Hal ini selaras dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016-2021 “Meningkatkan Kualitas SDM dan menurunkan angka kemiskinan dalam masyarakat” dengan sasaran “Menurunnya angka kemiskinan”.

- Kegiatan Kepedulian Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat dengan target 25 RTS, merupakan kegiatan untuk memfasilitasi pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility) dalam bentuk peningkatan kualitas rumah sehat. Kegiatan ini baru dilaksanakan tahun 2017 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19.176.900, realisasi 14.376.400 (74,97%).
- Kegiatan Pendampingan dan Penjangkauan kepada Mantan Pecandu Napza Pasca Rehabilitasi dengan target 148 orang realisasi 148 orang dengan capaian kinerja 100 %. Pagu anggaran Rp. 166.524.200,

realisasi Rp. 163.253.600 (98,04 %). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran mantan pecandu Napza untuk memiliki kehidupan sosial yang sehat. Dalam kegiatan ini, selain diberikan pendampingan para mantan pecandu Napza juga diberikan paket sembako. Di tahun 2016 kegiatan yang terkait dengan pencegahan dan penganggulan penyebaran HIV dan AIDS adalah kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan Napza HIV dan AIDS dengan target 300 orang realisasi 300 orang dengan capaian kinerja 100 %. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang ancaman Napza dan HIV/AIDS dengan pagu anggaran Rp. 19.542.000, realisasi Rp. 18.277.000 (93,53%).

Sasaran 2:
Meningkatnya penanganan tanggap darurat bagi korban bencana sesuai standar

Sasaran 2 yaitu Meningkatkan penanganan tanggap darurat bagi korban bencana sesuai standar terdiri dari 1 Indikator Kinerja. Untuk melihat



ketercapaian indikator kinerja ini, dapat dijelaskan pada pengukuran dan analisis sebagai mana pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Sasaran : 2
Meningkatnya penanganan tanggap darurat bagi korban bencana sesuai standar

No	Indikator Sasaran	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017
		Target	realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan korban bencana yang berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan sandang,pangan,tempat tinggal sementara, dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	-	-	-	50 orang	50 orang	100 %

Berdasarkan tabel 2.3 realisasi Cakupan korban bencana yang berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan sandang,pangan,tempat tinggal sementara, dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana tahun 2017 terealisasi sebesar 50 orang, dengan target kinerja sebesar 50 orang sehingga capaian kinerja sebesar 100 %.

Tercapainya target kinerja Cakupan korban bencana yang berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan sandang,pangan,tempat tinggal sementara, dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana



disebabkan karena komitmen pimpinan dan seluruh komponen perangkat daerah dalam memeberikan pelayanan kepada korban bencana untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan sandang,pangan,tempat tinggal sementara, dan layanan dukungan psikososial sesuai standar. Untuk tahun 2016 Dinas Sosial belum melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Cakupan korban bencana yang berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan sandang,pangan,tempat tinggal

sementara, dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana. Baru tahun 2017 yang merupakan awal pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016-2021, Dinas Sosial melalui program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan sebagai pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tahun 2017 dilaksanakan kegiatan Penyediaan Layanan Dapur Umum bagi Korban Pasca Bencana di kabupaten Badung pada Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.727.100 dan realisasi Rp. 24.169.300 (97,74 %). Pada dasarnya pencapaian indikator ini sangat dipengaruhi keadaan dan kondisi alam dan lingkungan. Dimana pada tahun 2017 terjadi erupsi Gunung Agung sehingga banyak masyarakat sekitar Gunung Agung yang terkena dampak harus mengungsi sampai ke Kabupaten Badung. Per 14 Desember 2017 jumlah pengungsi yang ada di Kabupaten Badung sebanyak 590 orang.

Sasaran 3:
Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Sasaran 3 yaitu Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terdiri dari 2 Indikator Kinerja. Untuk melihat ketercapaian indikator kinerja ini, dapat dijelaskan pada pengukuran dan analisis sebagai mana pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Sasaran : 3
Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

No	Indikator Sasaran	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh pemberdayaan Sosial	630 orang	630 orang	100 %	725 orang	725 orang	100 %

2.	Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	-	-		6000 orang	680 orang	11,33 %
----	--	---	---	--	------------	-----------	---------

Indikator 1
Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh pemberdayaan sosial

Berdasarkan tabel 2.4 realisasi Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh pemberdayaan Sosial tahun 2017 terealisasi sebesar 725 orang, dengan target kinerja sebesar 725 orang sehingga capaian kinerja sebesar 100 %.

Tecapainya target kinerja cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh pemberdayaan Sosial disebabkan karena komitmen pimpinan dan seluruh komponen perangkat daerah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Badung melalui pelaksanaan program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dengan kegiatan Bimbingan dan Pendampingan bagi KUBE Fakir Miskin, serta Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Usaha Ekonomi Produktif kepada Keluarga Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Badung dan kegiatan Pelatihan Ketrampilan Menjahit kepada Penyandang Disabilitas. Berikut grafik capaian kinerja Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh pemberdayaan Sosial

Capaian kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 terjadi peningkatan disebabkan adanya komitmen untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Capaian Kinerja Capaian Kinerja Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh pemberdayaan Sosial didukung dengan beberapa program kegiatan yaitu kegiatan Bimbingan dan Pendampingan bagi KUBE Fakir Miskin dengan target 8 KUBE (80 orang) realisasi 8 KUBE (80 orang), kegiatan

Pengendalian Pemanfaatan Usaha Ekonomi Produktif kepada Keluarga Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Badung dengan target 625 RTS/orang realisasi 625 RTS/orang dan kegiatan Pelatihan Ketrampilan Menjahit kepada Penyandang Disabilitas dengan target



20 orang
realisasi 20 orang.

- Kegiatan Bimbingan dan Pendampingan bagi KUBE Fakir Miskin merupakan salah satu cara

penanggulangan Kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat khususnya Fakir Miskin. Dengan pelaksanaan program kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan bagi rumah tangga



sasaran untuk menghidupi keluarga dan mempunyai penghasilan tetap.

Tahun 2016 alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 227.433.700,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

183.478.700,-(80,67%). Jumlah KUBE yang dibantu sebanyak 3 KUBE. Tiap KUBE berjumlah 10 orang dan diberikan bantuan berupa bantuan bibit sapi sebanyak 30 ekor sapi. Tahun 2017 alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 336.791.500, realisasi Rp. 314.972.200 (93,52 %). Jumlah KUBE yang dibantu sebanyak 8 KUBE, dan diberikan bantuan berupa bibit sapi sebanyak 30 ekor untuk 3 KUBE dan bantuan berupa bibit babi sebanyak 100 ekor, @ KUBE mendapatkan 20 ekor.

- Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Usaha Ekonomi Produktif kepada Keluarga Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Badung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin

melalui pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi, yang semuanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Pemerintah Kabupaten Badung telah memverifikasi Basis Data Terpadu Pendataan Program Perlindungan sosial (PPLS) Tahun 2011. Jumlah Data Base Rumah Tangga



Sasaran (RTS) sebanyak 13.294 RTS dengan Status Tingkat Kesejahteraan 1 (satu) sebanyak 3.082 RTS, Tingkat Kesejahteraan 2 (dua) sebanyak 5.101 RTS, Tingkat Kesejahteraan 3 (tiga) sebanyak 5.111 RTS. Kemudian dari hasil Musdes/Muskel ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 1121/03/HK/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Penetapan RTS Penerima Manfaat Raskin yang berjumlah 9.043 RTS, dan Data BDT Tahun 2015 yang berjumlah 10.968 RTS dimana data tersebut yang dijadikan sasaran penerima bantuan UEP tahun 2017 yang berjumlah 625 RTS di Kabupaten Badung. Pemerintah Kabupaten Badung berharap agar basis data terpadu ini dapat digunakan secara optimal dalam menangani kemiskinan untuk mendukung berbagai program perlindungan sosial yang dijalankan Pemerintah Pusat maupun Daerah (Kabupaten Badung).

Tahun 2016 Dinas Sosial Kabupaten Badung melaksanakan kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Usaha Ekonomi Produktif kepada Keluarga Rumah Tangga Miskin dengan target 600 RTS dan realisasi 600 RTS dan alokasi dana sebesar Rp. 20.418.000, terealisasi Rp. 16.918.600 (82,86 %). Tahun 2017 alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 34.673.200, realisasi sebesar Rp. 31.473.100 (90,77 %). Target 625 RTS realisasi fisik 625 RTS (100 %) menyasar 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Badung. Dana yang ada di Dinas Sosial merupakan pendukung/operasional pelaksanaan pemberian bantuan UEP, sedangkan alokasi dana yang akan diberikan kepada penerima UEP dianggarkan pada DPA PPKD sebesar Rp.

9.375.000.000, masing-masing RTS memperoleh Rp. 15.000.000. Berikut perkembangan pemberian bantuan UEP dari tahun 2016 sampai tahun 2017

Tabel 2.6
Pemanfaatan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Tahun 2016 dan Tahun 2017

No.	Bentuk UEP	Jumlah		Keterangan
		2016	2017	
1	Beternak	453 UEP	477 UEP	Di tahun 2017 ada yang beternak sapi, babi lele
2	Usaha Dagang	94 UEP	82 UEP	Usaha warung nasi,sembako, alat banten
3	Pertukagan		66 UEP	Tukang bangunan, tukang ukir, tukang perak, pande, tukang jahit
4	Tukang Jarit	11 UEP		
5	Alat Tukang	42 UEP		
	Jumlah	600 UEP	625 UEP	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk tahun 2017 diberikan kepada 600 orang RTS, dimana bantuan tersebut digunakan untuk berbagai macam usaha seperti untuk beternak sebanyak 453 RTS (75,5 %), 94 RTS (15,67 %) mempergunakan bantuan tersebut untuk usaha dagang, 11 RTS (1,8 %) untuk usaha tukang jarit, dan 42 RTS (7 %) mempergunakan bantuan UEP tersebut untuk usaha dibidang alat pertukangan. Sedangkan di tahun 2017 bantuan UEP yang menyasar 625 RTS digunakan untuk usaha seperti untuk beternak sebanyak 477 RTS (76,23 %), untuk usaha dagang sebanyak 82 RTS (13,12 %), dan untuk pertukangan sebanyak 66 RTS (10,56 %).



- Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Menjahit kepada Penyandang Disabilitas dengan target 20 orang realisasi 20 orang. Alokasi dana sebesar Rp. 285.973.800, realisasi 282.996.100 (98,96 %) Pelaksanaan kegiatan ini mempunyai tujuan memberikan fasilitas rehabilitasi pemberdayaan penyandang disabilitas luar panti yang

secara singkat dapat menghasilkan uang sehingga pemenuhan kebutuhan pribadi maupun keluarga dapat teratasi untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri dalam lingkungan hidup bermasyarakat. Yang menjadi sasaran dalam kegiatan pelatihan keterampilan menjahit kepada penyandang disabilitas adalah Penyandang Disabilitas Menjahit Pakaian adalah warga masyarakat penyandang disabilitas tubuh ringan dan penyandang disabilitas tuna rungu wicara atau TRW yang bisa baca tulis sebanyak 20 orang.

Indikator 2

Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial

Berdasarkan tabel 2.5 realisasi Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial tahun 2017 terealisasi sebesar 680 orang, dengan target kinerja sebesar 6000 orang sehingga capaian kinerja sebesar 11,33 %. Pencapaian Indikator kinerja Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan didukung oleh program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, kegiatan Verifikasi Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan mulai tahun 2017, merupakan kebijakan pimpinan dalam upaya menyejahterakan masyarakat dan sesuai dengan Peraturan Bupati Badung (Perbub) Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Bagi Penunggu Pasien Rendahnya capaian kinerja dari indikator tersebut karena regulasi tentang pelaksanaa dari kegiatan ini baru sah setelah APBD perubahan, jadi sosialisasi dan pelaksanaannya baru bisa dilaksanakan menjelang akhir tahun 2017.



Alokasi dana untuk kegiatan Verifikasi Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien Di Kabupaten Badung sebesar Rp. 27.040.400, realisasi sebesar Rp. 13.963.900 (51,64 %). Dana tersebut merupakan pendukung/operasional dalam mendukung pelaksanaan pemberian bantuan kepada penunggu

pasien, sedangkan dan untuk bantuan tersebut dianggarkan pada DPA PPKD sebesar Rp. 8.000.000.000,- realisasi Rp. 1.146.600.000,-

Sasaran 4:
Meningkatkan implementasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Sasaran 4 yaitu Meningkatkan implementasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah terdiri dari 3 Indikator Kinerja. Untuk melihat ketercapaian



indikator kinerja ini, dapat dijelaskan pada pengukuran dan analisis sebagai mana pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Sasaran : 4
Meningkatkan implementasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah

No	Indikator Sasaran	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017
		Target	realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase kehadiran pegawai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Predikat AKIP	B	B	100 %	B	-	-
3.	Persentase realisasi belanja langsung dan tidak langsung	100 %	89,45 %	89,45 %	100 %	81,66 %	81,66 %

Berdasarkan tabel 2.6 realisasi kinerja Persentase kehadiran pegawai tahun 2017 terealisasi sebesar 100 %, dengan target kinerja sebesar 100 % sehingga capaian kinerja sebesar 100 %. Untuk capaian kinerja Predikat AKIP ditahun 2016 Dinas Sosial mendapat predikat B sedangkan untuk tahun 2017 diharapkan bisa mempertahankan predikat B tersebut. Sedangkan untuk capaian kinerja persentase realisasi belanja langsung dan tidak langsung, tahun 2016 realisasi keuangan dinas sosial 89,45 %, dan tahun

2017 realisasi keuangan sebesar 81,66 %. Capaian kinerja realisasi keuangan tidak mencapai 100 % disebabkan karena beberapa hal seperti efisiensi harga, pelaksanaan kegiatan yang bersifat insidental, fluktuasi harga.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial

Perencanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sosial dan tenaga kerja, dilakukan dengan memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi tepat sasaran. Memperhatikan isu – isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas hasil pembangunan menjadi lebih baik, sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Belum optimalnya penanganan dampak sosial akibat bencana alam maupun bencana sosial
2. Masih kurangnya kepedulian berbagai pihak terhadap masalah Lanjut Usia/LANSIA.
3. Belum optimalnya penjangkauan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Permasalahan tersebut telah melahirkan isu-isu strategis yang memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan yang implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan dampak sosial akibat bencana alam maupun bencana sosial;
2. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian berbagai pihak terhadap masalah lanjut usia/Lansia;
3. Mengantisipasi munculnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baru.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL

3.1. Tujuan Rencana Kerja Dinas Sosial

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi Kabupaten Badung serta didasarkan pada isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

Tujuan sasaran pembangunan jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Badung sesuai dengan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah:

Tujuan :

1. Menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan sosial
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang good goverment

3.2. Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu tahunan. Adapun sasaran yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Sasaran (Tujuan 1)

1. Meningkatnya rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Meningkatnya penanganan tanggap darurat bagi korban bencana sesuai standar
3. Meningkatnya Akses Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Sasaran (Tujuan 2)

Meningkatkan implementasi akuntabilitas kinerja perangkat Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, Renja Dinas Sosial Kabupaten disusun, yang mana nantinya Renja tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas tentang rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Sosial Tahun 2019 serta dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Badung Tahun 2020.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	29.400.000
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / operasional	Rp.	24.400.000
3. Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Rp.	5.075.000
4. Pengelolaan Kebersihan Kantor	Rp.	74.260.200
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp.	24.569.210
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	20.215.900
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	4.500.000
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Rp.	31.140.000
9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp.	12.410.000
10. Rapat – rapat koordinasi ke luar Daerah	Rp.	200.000.000
11. Penyediaan Bahan Dekorasi	Rp.	4.995.000
12. Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional	Rp.	344.460.000
13. Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan	Rp.	48.700.000
14. Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	Rp.	91.000.000

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp.	57.500.000
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp.	89.500.000
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp.	6.500.000
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Rp.	219.000.000
5. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Rp.	42.000.000
6. Pemeliharaan Peralatan Kantor	Rp.	19.750.000

**3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- | | | |
|---|-----|-------------|
| 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Rp. | 205.860.000 |
| 2. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Rp. | 5.867.600 |

**4. Program Peningkatan Kualitas dan
Penyebaran Informasi**

- | | | |
|--|-----|-------------|
| 1. Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS di Kabupaten Badung | Rp. | 136.248.060 |
|--|-----|-------------|

**5. Program Perencanaan dan Penganggaran
SKPD**

- | | | |
|--|-----|------------|
| 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA) | Rp. | 11.687.500 |
|--|-----|------------|

**6. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya**

- | | | |
|---|-----|-------------|
| 1. Kepedulian terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat | Rp. | 24.875.000 |
| 2. Verifikasi dan Monitoring Peningkatan Kualitas Rumah Sehat | Rp. | 210.649.500 |

**7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial**

- | | | |
|---|-----|-------------|
| 1. Penanganan Orang Terlantar, Pembinaan, Penampungan Sementara dan Pemulangan PSK Gepeng ke Daerah Asal | Rp. | 353.440.910 |
| 2. Peningkatan Kesejahteraan dan Peran Veteran Pejuang Kemerdekaan RI di Kabupaten Badung | Rp. | 315.236.600 |
| 3. Pengendalian Pemanfaatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Keluarga Rumah Tangga Sasaran di Kab. Badung | Rp. | 347.660.680 |

4. Pembinaan dan Pelayanan Sosial kepada Karang Lansia di Kab. Badung	Rp.	258.594.200
5. Penyediaan Layanan Dapur Umum bagi Korban Pasca Bencana di Kab. Badung	Rp.	29.809.400
6. Verifikasi Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien di Kab. Badung	Rp.	250.620.600
7. Rehabilitasi dan Pembinaan kepada Penyandang Disabilitas di Kab. Badung	Rp.	607.127.100
8. Verifikasi Pemberian Perlindungan Sosial bagi Lansia di Kabupaten Badung	Rp.	248.841.600
9. Monev Kegiatan PKH, Perlindungan Lansia dan Bansos Penunggu Pasien di Kabupaten Badung	Rp.	38.227.600
10. Pelaksanaan Bantuan Sosial Rastra dan Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT)	Rp.	319.342.200
11. Bimbingan dan Penyuluhan Napza HIV dan AIDS	Rp.	51.731.200
12. Pemantapan Magang kepada Penyandang Disabilitas	Rp.	75.134.400
8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		
1. Pelestarian Nilai Perjuangan Masyarakat Badung	Rp.	31.849.500
2. Napak Tilas Jejak Pahlawan I Gusti Ngurah Rai	Rp.	735.664.700
3. Peningkatan Peran Aktif K3S Kab. Badung	Rp.	474.170.500
4. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) di Kab. Badung	Rp.	168.914.200
5. Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) di Kab. Badung	Rp.	168.511.500
6. Peringatan Hari Besar Nasional	Rp.	2.412.485.300
7. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Sosialisasi Penyelenggaraan Undian Berhadiah/UGB dan Pengumpulan Uang/Barang /PUB)	Rp.	47.310.500
8. Peningkatan Peran Aktif PWRI dan Komda Lansia Kab. Badung	Rp.	67.333.200

9. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi LKS/Yayasan/Panti di Kab. Badung	Rp.	46.760.900
10. Peningkatan Peran Aktif Program Keluarga Harapan (PKH) di Kab. Badung	Rp.	292.711.500
11. Peningkatan Peran Aktif Taruna Siaga Bencana (TAGANA) di Kab. Badung	Rp.	25.338.200
12. Pembinaan dan Lomba Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Karang Taruna (KT) Berprestasi	Rp.	81.113.100
13. Unit Reaksi Cepat (URC) Dinas Sosial Kabupaten Badung	Rp.	157.532.600

TABEL 4.1
RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)							(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
										9.550.025.160				10.245.950.726
1	06					URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL				9.550.025.160				10.245.950.726
1	06	01	01			DINAS SOSIAL				9.550.025.160				10.245.950.726
				01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD			915.125.310				1.006.637.841
				02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinsos	12 bulan	29.400.000	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	12 bulan	32.340.000
				06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Dinsos	27 unit kendaraan	24.400.000	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	27 unit kendaraan	26.840.000
				07		Pelayanan Jasa Adminstrasi Keuangan	Jumlah Jasa administrasi keuangan yang tersedia	Dinsos	12 bulan	5.075.000	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	12 bulan	5.582.500
				08		Pengelolaan kebersihan kantor	waktu pengelolaan kebersihan kantor yang optimal	Dinsos	1 paket	74.260.200	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	1 paket	81.686.220
				10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	Dinsos	12 bulan	24.569.210	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	12 bulan	27.026.131
				11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinsos	12 bulan	20.215.900	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	12 bulan	22.237.490
				12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinsos	12 bulan	4.500.000	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	12 bulan	4.950.000
				15		Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang - undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dinsos	324 eksemplar	31.140.000	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	324 eksemplar	34.254.000
				17		Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	Dinsos	12 bulan	12.410.000	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	12 bulan	13.651.000

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)							(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					18	Rapat - rapat Koordinasi ke luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinsos	1 paket	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	1 paket	220.000.000
					19	Penyediaan Bahan Dekorasi	Jumlah bahan dekorasi yang disediakan	Dinsos	12 bulan	4.995.000	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	12 bulan	5.494.500
					20	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan dinas/operasional	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakan untuk kendaraan dinas/operasional	Dinsos	40.680 liter (27 unit)	344.460.000	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	40.680 liter (27 unit)	378.906.000
					21	Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan	Jumlah bahan upacara keagamaan yang tersedia	Dinsos	12 bulan	48.700.000	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	12 bulan	53.570.000
					29	Penganyaran dan Persembahyangan ke pura Kahyangan jagat	Jumlah Upakara Penganyaranke Pura-pura Khayangan Jagat	Dinsos	1 paket	91.000.000	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	1 paket	100.100.000
				02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				434.250.000				477.675.000
					09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	Dinsos	1 paket	57.500.000	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	1 paket	63.250.000
					11	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Dinsos	1 paket	89.500.000	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	1 paket	98.450.000
					22	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	Dinsos	2 paket	6.500.000	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	2 paket	7.150.000
					24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala	Dinsos	27 kendaraan	219.000.000	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	27 kendaraan	240.900.000
					26	Pemeliharaan perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Dinsos	12 bulan	42.000.000	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	12 bulan	46.200.000
					28	Pemeliharaan peralatan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Dinsos	1 paket	19.750.000	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	1 paket	21.725.000
				06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			211.727.600				232.900.360
					01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtiksar Realisasi Kinerja SKPD (Tim)	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinsos	12 bulan	205.860.000	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	12 bulan	226.446.000

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)							(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					05	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Dinsos	25 buku	5.867.600	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	25 buku	6.454.360
				08		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI	Terlaksananya Peningkatan kualitas penyebaran informasi			136.248.060				149.872.866
					03	Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS di Kabupaten Badung	Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas data PMKS dan PSKS	Dinsos	80 buku	136.248.060	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan Awal RKPD	80 buku	149.872.866
				09		PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terwujudnya sinergitas dokumen perencanaan dan penganggaran			11.687.500				12.856.250
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja,RKA)	Jumlah dan jenis kegiatan yang direcanakan dan dianggarkan	Dinsos	3 dokumen	11.687.500	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	3 dokumen	12.856.250
				15		PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG PMKS LAINNYA	Terwujudnya Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil (Kat) dan Penyandang PMKS Lainnya			235.524.500				259.076.950
					02	Kepedulian Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat	Jumlah stakeholder yang ikut terlibat dalamperlindungan sosialperlindungan sosial	Dinsos	25 RTS	24.875.000	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	25 RTS	27.362.500
					03	Verifikasi dan Monitoring Peningkatan Kualitas Rumah Sehat	Jumlah rumah tangga sasaran yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas rumah sehat	Dinsos	500 RTS	210.649.500	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	500 RTS	
				16		PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Terlaksannya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			2.895.766.490				3.185.343.139
					02	Penanganan Orang Terlantar, Pembinaan, Penampungan Sementara dan Pemulangan PSK Gepeng ke Daerah Asal	Jumlah orang terlantar yang tertangani dan jumlah PSK gepeng yang dibina, ditampung sementara dan dipulangkan ke daerah asal	Dinsos	460 orang	353.440.910	Pendapatan Asli daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	460 orang	388.785.001

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)							(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					04	Peningkatan Kesejahteraan dan Peran Veteran Pejuang Kemerdekaan RI di Kabupaten Badung	Jumlah Veteran yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Dinsos	150 orang	315.236.600	Pendapatan Asli daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	150 orang	346.760.260
					07	Pengendalian Pemanfaatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Keluarga Rumah Tangga Sasaran di Kabupaten Badung	Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang memperoleh Bantuan UEP	Dinsos	500 RTS	347.660.680	Pendapatan Asli daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	500 RTS	382.426.748
					15	Pembinaan dan Pelayanan Sosial kepada Karang Lansia di Kabupaten Badung	Jumlah karang lansia yang terbentuk dalam satu tahun	Dinsos	15 karang lansia	258.594.200	Pendapatan Asli daerah	Rancangan Awal RKPD	15 karang lansia	284.453.620
					17	Penyediaan Layanan Dapur Umum Bagi korban pasca bencana di Kabupaten Badung	jumlah korban pasca bencana yang mendapatkan pelayanan	Dinsos	50 orang	29.809.400	Pendapatan Asli daerah	Rancangan Awal RKPD	50 orang	32.790.340
					20	Verifikasi Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien di Kab. Badung	Jumlah penunggu pasien yang memperoleh bantuan sosial	Dinsos	6000 orang	250.620.600	Pendapatan Asli daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	6000 orang	275.682.660
					21	Rehabilitasi dan Pembinaan kepada Penyandang Disabilitas di Kab. Badung	Cakupan penyandang disabilitas yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial dasar	Dinsos	100 orang	607.127.100	Pendapatan Asli daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	100 orang	667.839.810
					26	Verifikasi Pemberian Perlindungan sosial Bagi lansia di Kabupaten Badung	Terlaksananya Pemberian Bantaun Langsung Tunai Bagi Lansia	Dinsos	13.733 orang	248.841.600	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	13.733 orang	273.725.760
					27	Monev Kegiatan PKH, Perlindungan Lansia dan Bansos Penunggu Pasien di Kab. Badung	Jumlah Monev PKH, Perlindungan Sosial bagi Lansia dan Bansos Penunggu Pasien yang dilaksanakan	Dinsos	1 Kegiatan	38.227.600	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	1 Kegiatan	42.050.360
					28	Pelaksanaan Bantuan Sosial Rastra dan Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT)	Tersalurkannya BPNT Rastra yang Tepat Sasaran di Kabupaten Badung	Dinsos	6873 KPM	319.342.200	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	6873 KPM	351.276.420
					30	Bimbingan dan Penyuluhan Napza, HIV dan AIDS	Jumlah Pendampingan dan Penjangkauan kepada Mantan pecandu Napza Pasca	Dinsos	165 orang	51.731.200	Pendapatan Asli daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	165 orang	56.904.320
					31	Pemantapan Magang kepada Penyandang Disabilitas	Tersedianya Tenaga Terampil di Bidang Menjahit	Dinsos	5 orang	75.134.400	Pendapatan Asli daerah	Rancangan Awal RKPD	5 orang	82.647.840
				21		PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			4.709.695.700				5.180.665.270

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)							(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					05	Pelestarian Nillai Perjuangan Masyarakat Badung	Terwujudnya pelestarian nilai perjuangan masyarakat Badung	Dinsos	1 paket	31.849.500	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	1 paket	35.034.450
					06	Napak Tilas Jejak Pahlawan I Gusti Ngurah Rai	Terlaksananya Napak Tilas Jejak Pahlawan I Gusti Ngurah Rai	Dinsos	660 orang / 60 regu	735.664.700	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	660 orang / 60 regu	809.231.170
					08	Peningkatan Peran K3S Kabupaten Badung	Meningkatnya peran aktif K3S Kabupaten Badung	Dinsos	200 orang	474.170.500	Pendapatan Asli Daerah	Rancangan Awal RKPD	200 orang	521.587.550
					09	Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) di Kabupaten Badung	Jumlah Lansia yang memperoleh bantuan PMT	Dinsos	400 lansia	168.914.200	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	200 lansia	185.805.620
					11	Peringatan Hari disabilitas Internasional (HDI) di Kabupaten Badung	Terlaksananya Peringatan Hari disabilitas Internasional (HDI) di Kabupaten Badung	Dinsos	200 orang	168.511.500	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	200 orang	185.362.650
					13	Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah Hari Besar Nasional yang diperingati	Dinsos	4 hari besar	2.412.485.300	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	4 hari besar	2.653.733.830
					14	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Sosialisasi Penyelenggaraan Undian Berhadiah/UGB dan Pengumpulan Uangan/Barang PUB)	Jumlah Masyarakat dan Dunia Usaha yang memperoleh Sosialisasi Penyelenggaraan UGB dan PUB	Dinsos	180 orang	47.310.500	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	180 orang	52.041.550
					15	Peningkatan Peran Aktif PWRI dan Komda Lansia	Penguatan Kelembagaan PWRI dan Komda Lansia Kabupaten Badung	Dinsos	2 Organisasi	67.333.200	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	2 Organisasi	74.066.520
					16	Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi LKS/Yayasan/Panti di Kabupaten Badung	Jumlah Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi LKS/Yayasan/Panti Se-Kabupaten Badung	Dinsos	20 LKS/Yayasan/P anti	46.760.900	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	20 LKS/Yayasan/P anti	51.436.990
					17	Peningkatan Peran Aktif Program Keluarga Harapan (PKH) di Kab. Badung	Meningkatnya peran aktif PKH di Kab. Badung	Dinsos	1 organisasi	292.711.500	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	1 organisasi	321.982.650
					18	Peningkatan Peran Aktif Taruna Siaga Bencana (TAGANA) di Kab. Badung	Penguatan kelembagaan TAGANA Kabupaten Badung	Dinsos	1 Organisasi	25.338.200	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	1 Organisasi	27.872.020
					19	Pembinaan dan Lomba Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Karang Taruna (KT) Berprestasi	Peningkatan kualitas PSM dan karang taruna Kabupaten Badung	Dinsos	6 PSM dan 6 Karang Taruna	81.113.100	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	6 PSM dan 6 Karang Taruna	89.224.410
					20	Unit Reaksi Cepat (URC) Dinas Sosial Kabupaten Badung	Terlaksananya kegiatan URC di Kabupaten Badung	Dinsos	1 organisasi	157.532.600	Pendapatan Asli Daerah	Sesuai Analisis Kebutuhan	1 organisasi	173.285.860

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Badung menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan pembangunan khususnya pembangunan dibidang sosial sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Badung merupakan sarana untuk mengakomodir isu-isu strategis/permasalahan pembangunan yang difokuskan penanganannya serta menjadi kebutuhan masyarakat dan daerah.

Rencana Kerja (Renja) selain menjadi dokumen rencana dari pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Badung pada Tahun 2019, akan berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renja juga memuat tingkat capaian, serta kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun sebelumnya, yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan serta penyusunan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen rencana aksi (*action plan*) yang memuat skala prioritas program/kegiatan pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Badung serta mendukung arahan skala prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial disusun dengan selalu memperhatikan masukan dari desa,kecamatan dan kinerja pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah tahun berjalan.

Dengan demikian, penyusunan rencana kerja Dinas Sosial merupakan daftar prioritas kegiatan yang telah melalui tahap sinkronisasi prioritas pembangunan kecamatan dengan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Badung.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BADUNG

DRH. I KETUT SUDARSANA, M.M.A
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640705 199203 1 011

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA